

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016-2020**

**Vebi Regina¹ , Imam Nazarudin Latif² , Ida Rahmawati³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email: vebyrgna407@gmail.com**

ABSTRACT

Keywords :

***Budget Realization, Regional
Expenditure Harmony Analysis***

Analysis of the Realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the Communication and Informatics Office of East Kalimantan Province 2016-2020.

The research objective to be achieved is to find out and analyze whether the average performance of Operational Expenditures against Total Regional Expenditures at the Communication and Informatics Office of East Kalimantan Province in 2016-2020 is very harmonious when viewed from the Analysis of Expenditure Harmony. To find out and analyze whether the average Performance of Capital Expenditures against Total Regional Expenditures at the Communication and Information Technology Office of East Kalimantan Province .

The theoretical basis used is that financial management is one of the company's operational functions which is very important among the company's other operational functions. Original Regional Revenue (PAD) is all regional revenue that comes from original regional economic sources.

The results of this study are the average performance of the ratio analysis of Operational Expenditures to Total Regional Expenditures at the Office of Communication and Information Technology of East Kalimantan Province in 2016-2020 is very harmonious, because Regional Expenditures and Operational Expenditures are realized by the budget well and Analysis of the Correspondence of Capital Expenditures against Total Regional Expenditures at the Office of Communication and Information Technology of East Kalimantan Province in 2016-2020 are not harmonious,

PENDAHULUAN

Peran Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya.

Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mengalami surplus setiap tahunnya karena realisasi lebih rendah dari pada yang di anggarkan. Sehingga terjadi sisa anggaran (SILPA) pada akhir tahun karena pelampauan target pendapatan dan tidak tercapainya target realisasi belanja. Pelampauan target pendapatan bisa disebabkan beberapa hal, seperti PAD yang ditargetnya di bawah potensi rill, informasi tentang penerimaan daerah dari Pemerintah diperoleh setelah penetapan Perda APBD-P, dan diterimanya lain-lain pendapatan yang sah setelah APBD-P ditetapkan. Sedangkan ketidaktercapaian target belanja bisa disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (*output* kegiatan tercapai, tetapi anggarannya tidak terealisasi seluruhnya), kegiatan belum selesai (sehingga anggaran yang belum digunakan “dibawa” ke tahun anggaran berikutnya), dan kegiatan yang batal dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan membahas lebih lanjut dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020”.

Manajemen keuangan semua aktivitas organisasi didalam upaya mendapatkan, mengalokasikan, menggunakan dana organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan mengalami berbagai perkembangan, berawal dari pengertian yang hanya sekedar mengutamakan kegiatan mendapatkan atau memperoleh dana saja hingga mencakup kegiatan mendapatkan, cara menggunakan dana hingga pengelolaan terhadap aset (aktiva) perusahaan.

Pengertian manajemen keuangan menurut Dadang, (2017:1) adalah : Perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan.

Keuangan daerah tidak terlepas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya merupakan salah satu alat yang dipakai sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan

masyarakat daerah. Menurut Khusaini, (2018:2) Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Mahsun (2009:146) “Anggaran Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam satu tahun anggaran”. Menurut Halim, (2013:21) Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana, satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Damas, (2017:18) “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Rachim (2015:44) “Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah”.

Pembangunan merupakan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas tatanan yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri. Sedangkan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur di luar tatanan agar tatanan mampu berkembang secara mandiri. Pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Menurut Halim (2013:21) Berdasarkan Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah dimana, satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam tahun-tahun dengan anggaran tertentu.

Menurut Nordiawan dkk (2011:39) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.”

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian serta harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini merupakan bagian dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD.

METODE PENELITIAN

Analisis varians dilakukan dengan membandingkan realisasi (kinerja aktual) dengan yang dianggarkan. Analisis varians berfokus pada varians Pendapatan dan Belanja. Dari hasil analisis varians tersebut, kemudian dinyatakan dalam bentuk presentase antara realisasi anggaran dengan yang dianggarkan, yaitu :

$$\text{Varians} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \%$$

Sumber : Mahmudi, (2012:22) Menarik kesimpulan dari hasil analisis varians, yaitu :

- Bila rencana anggaran sama dengan realisasinya, maka dapat dikatakan bahwa anggaran belanja sudah sesuai dengan realisasinya.
- Bila rencana anggaran lebih besar dari realisasinya, maka dapat dikatakan bahwa anggaran belanja tidak sesuai dengan realisasinya.
- Bila rencana anggaran lebih kecil dari realisasinya, maka dapat dikatakan bahwa anggaran belanja tidak sesuai dengan realisasinya.

Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin yang di rumuskan sebagai berikut :

$\text{Rasio Belanja Operasi Total Biaya} = \frac{\text{Rasio Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
--

Sumber : Mahmudi, (2012:150)

- Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah

Berbeda dengan Belanja Operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Rasio belanja modal terhadap total belanja dapat dirumuskan:

$$\text{Rasio Belanja Modal Total Biaya} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi, (2012:159)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Belanja pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Tahun 2016 (Rupiah)

No		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Belanja	30.372.816.514,10	28.847.707.531,00
II	Belanja Operasional	29.909.316.514,10	28.386.957.531,00
	1 Belanja Pegawai	7.462.212.514,10	6.729.069.642,00
	2 Belanja Barang dan Jasa	22.447.104.000,00	21.657.887.889,00
III.	Belanja Modal	463.500.000,00	460.750.000,00
	1 Belanja Modal Peralatan & Mesin	409.000.000,00	406.250.000,00
	2 Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-
	3 Belanja Aset Tetap lainnya	54.500.000,00	54.500.000,00

(Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, 2020)

Tabel 2. Rencana dan Realisasi Belanja pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Tahun 2017 (Rupiah)

No		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I.	Belanja	19.138.886.000,00	16.816.455.782,00
II.	Belanja Operasional	18.550.936.000,00	16.232.155.782,00
	1. Belanja Pegawai	9.618.886.000,00	8.004.317.630,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	8.932.050.000,00	8.227.838.152,00
III.	Belanja Modal	587.950.000,00	584.300.000,00
	1. Belanja Modal Peralatan & Mesin	587.950.000,00	584.300.000,00
	2. Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-

(Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, 2020)

Tabel 3. Rencana dan Realisasi Belanja pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Tahun 2018 (Rupiah)

No.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I.	Belanja	18.011.746.000,00	16.360.537.779,00
II.	Belanja Operasional	17.252.096.000,00	15.614.648.379,00
	1. Belanja Pegawai	9.870.546.000,00	8.651.732.530,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	7.381.550.000,00	6.962.915.849,00
III.	Belanja Modal	759.650.000,00	745.889.400,00
No.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1. Belanja Modal Peralatan & Mesin	736.450.000,00	722.705.400,00
	2. Belanja Modal Gedung & Bangunan	23.200.000,00	23.184.000,00

(Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, 2020)

Tabel 4. Rencana dan Realisasi Belanja pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Tahun 2019 (Rupiah)

No		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Belanja	26.349.917.000,00	23.401.998.017,00
II	Belanja Operasional	24.899.827.000,00	22.002.429.037,00
	1 Belanja Pegawai	10.164.417.000,00	8.560.538.423,00
	2 Belanja Barang dan Jasa	14.735.410.000,00	13.441.890.614,00
III	Belanja Modal	1.450.090.000,00	1.399.568.980,00
	1 Belanja Modal Peralatan & Mesin	1.450.090.000,00	1.399.568.980,00
	2 Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-

(Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, 2020)

Tabel 5. Rencana dan Realisasi Belanja pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Tahun 2020 (Rupiah)

No		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Belanja	25.827.204.281,00	22.544.252.329,00
II	Belanja Operasional	22.002.462.344,00	19.643.144.629,00
	1 Belanja Pegawai	9.850.150.000,00	8.251.981.479,00
	2 Belanja Barang dan Jasa	12.152.312.344,00	11.391.163.150,00
No		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
III	Belanja Modal	3.824.741.937,00	2.901.107.700,00
	1 Belanja Modal Peralatan & Mesin	3.824.741.937,00	2.901.107.700,00
	2 Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-

(Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, 2020)

PEMBAHASAN

Tabel 6. Rekapitulasi Analisis Keserasian Belanja Operasional Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim tahun 2016-2020

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah (%)	Rasio Keserasian
	1	2	$3 = (2/1) \times 100\%$	4
2016	28.847.707.531	28.386.957.531	98,40%	Sangat Serasi
2017	16.816.455.782	16.232.155.782	96,52%	Sangat Serasi
2018	16.360.537.779	15.614.648.379	95,44%	Sangat Serasi
2019	23.401.998.017	22.002.429.037	94,02%	Sangat Serasi
2020	22.544.252.329	19.643.144.629	87,13%	Sangat Serasi
Rata-Rata			94,30%	Sangat Serasi

Sumber : Data diolah Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui untuk tahun 2016 total belanja daerah sebesar Rp.28.793.207.531 dengan belanja operasi sebesar Rp. 28.386.957.531 sehingga rasio belanja operasi terhadap total belanja sebesar 98,40% dengan kategori rasio sangat serasi, pada tahun 2017 total belanja daerah sebesar Rp. 16.816.455.782 dengan belanja operasi sebesar Rp.16.232.155.782 sehingga rasio belanja operasi terhadap total belanja sebesar 96,52% dengan kategori rasio sangat serasi, pada tahun 2018 total belanja daerah sebesar Rp. 16.816.455.782 dengan belanja operasi sebesar Rp.15.614.648.379 sehingga rasio belanja operasi terhadap total belanja sebesar 95,44%, pada tahun 2019 total belanja daerah sebesar Rp. 23.401.998.017,00 dengan belanja operasi sebesar Rp.22.002.429.037,00 sehingga rasio belanja operasi terhadap total belanja sebesar 94,02% dengan kategori rasio sangat serasi, pada tahun 2020 total belanja daerah sebesar Rp. 22.544.252.329,00 dengan belanja operasi sebesar Rp.19.643.144.629,00 sehingga rasio belanja operasi terhadap total belanja sebesar 87,13% rata-rata rasio keserasian dari tahun 2016-2020 diperoleh sebesar 94,3% dengan kategori sangat serasi, sehingga hipotesis pertama di terima.

Tabel 7. Rekapitulasi Analisis Keserasian Belanja Modal Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim tahun 2016-2020

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah (%)	Rasio Keserasian
	1	2	$3 = (2/1) \times 100\%$	4
2016	28.847.707.531	460.750.000	1,59%	Tidak Serasi
2017	16.816.455.782	584.300.000	3,47%	Tidak Serasi
2018	16.360.537.779	745.889.400	4,56%	Tidak Serasi
2019	23.401.998.017	1.399.568.980	5,98%	Tidak Serasi
2020	22.544.252.329	2.901.107.700	12,87%	Tidak Serasi
Rata-Rata			5,69%	Tidak Serasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui untuk tahun 2016 total belanja daerah sebesar Rp.28.847.707.531 dengan belanja modal sebesar Rp.460.750.000 sehingga rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 1,59% dengan kategori rasio tidak serasi. Pada tahun 2017 total belanja daerah sebesar Rp.16.816.455.782 dengan belanja modal sebesar Rp.584.300.000 sehingga rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 3,47% dengan kategori rasio tidak serasi. Pada tahun 2018 total belanja daerah sebesar Rp.16.360.537.779 dengan belanja modal sebesar Rp.745.889.400 sehingga rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 4,56% dengan kategori rasio tidak serasi. Pada tahun 2019 total belanja daerah sebesar Rp.23.401.998.017 dengan belanja modal sebesar Rp.1.399.568.980 sehingga rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 5,98% dengan kategori rasio tidak serasi. Pada tahun 2020 total belanja daerah sebesar Rp.22.544.252.329 dengan belanja modal sebesar Rp.2.901.107.700 sehingga rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 12,87% dengan kategori rasio tidak serasi. Rata-rata rasio keserasian dari tahun 2016-2020 diperoleh sebesar 5,69% dengan kategori sangat serasi, sehingga hipotesis kedua ditolak.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:

1. Kinerja rata-rata Analisis Rasio Keserasian Belanja Operasional terhadap Total Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim tahun 2016-2020 Sangat Serasi. Disebabkan karena Belanja Daerah dan Belanja Operasional terealisasi anggaran dengan baik.

2. Kinerja rata-rata Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim tahun 2016-2020 Tidak Serasi. Tidak terealisasi anggaran dengan baik disebabkan karena lebih besar Belanja Daerah daripada Belanja Modal.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Saran yang diberikan peneliti antara lain Untuk kinerja belanja sebaiknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan realisasi belanja pada Belanja Modal karena terjadi ketidak serasian pada tahun 2016-2020, dan tetap mengefisiensikan Belanja Modal daripada Belanja Operasi. Harus meningkatkan alokasi dana mereka untuk Belanja Modal dan Pembangunan.

REFERENCES

- Damas, Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Dadang, Prasetyo Jatmiko. 2017. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Harmono, 2014. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Khusaini, Moh. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Nordiawan Deddi, dkk. 2011. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rachim, Abd. 2015. *Barometer Keuangan Negara*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.